

## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Intan Caroline<sup>1</sup>, Holva Lovana Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail: [intancaroline8bgr@gmail.com](mailto:intancaroline8bgr@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :02-04-2026

Revised :21-04-2026

Accepted :30-04-2026

#### **Keywords:**

Quality assurance system implementation, training institutions, nonformal education, educational quality management

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study aims to describe and analyze the implementation of a quality assurance system in training institutions and nonformal education as an effort to improve the quality of educational services and professional performance. The quality assurance system is viewed as a strategic mechanism that ensures all training processes, from planning and implementation to evaluation, are carried out in accordance with established standards. This research employed a qualitative approach using observation and interviews with managers of training institutions that implement an international quality management standard, namely ISO 21001:2018. The findings indicate that the implementation of a quality assurance system supported by leadership commitment, active involvement of all organizational members, and a sustainable quality culture contributes significantly to improving institutional effectiveness, human resource professionalism, and trainee satisfaction. Therefore, quality assurance systems function not only as control tools but also as instruments for continuous improvement in training institutions and nonformal education.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan

pendidikan nonformal sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan profesionalisme kerja. Sistem penjaminan mutu dipandang sebagai mekanisme strategi yang memastikan seluruh proses pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap pengelola lembaga pelatihan yang menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis standar internasional ISO 21001:2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu yang didukung oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh unsur organisasi, serta budaya mutu yang berkelanjutan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga, profesionalisme sumber daya manusia, dan kepuasan peserta pelatihan. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal secara berkelanjutan.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga profesionalisme dan etika kerja yang baik. Pendidikan dan pelatihan menjadi instrumen utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu bersaing di dunia kerja. Selain pendidikan nonformal, pendidikan nonformal dan lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pembelajaran yang fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan industry. Oleh karena itu, mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan lembaga dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mutu pendidikan dan pelatihan tidak dapat tercapai secara optimal tanpa adanya sistem penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Menurut Sallis (2012), penjaminan mutu dalam pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengendalian proses dan evaluasi berkelanjutan. Penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas proses pembelajaran, pengelolaan organisasi, serta kepuasan peserta didik sebagai pengguna layanan pendidikan.

Dalam konteks manajemen mutu, konsep Total Quality Management (TQM) menjadi salah satu landasan teoritis yang relevan dalam penerapan sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan dan pelatihan. Goetsch dan Davis (2014) menjelaskan bahwa TQM merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan mutu secara menyeluruh melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi. Prinsip utama TQM meliputi fokus pada pelanggan, keterlibatan total sumber daya manusia, perbaikan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan TQM dalam lembaga pelatihan berarti bahwa seluruh unsur lembaga, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, staf administrasi, hingga peserta pelatihan, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Selain TQM, konsep continuous improvement atau peningkatan mutu berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam sistem penjaminan mutu. Deming (1986) melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) menekankan bahwa mutu harus ditingkatkan secara terus-menerus melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkontrol, evaluasi yang sistematis, serta tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip ini sangat relevan diterapkan pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal, mengingat dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah. Dengan adanya siklus perbaikan berkelanjutan, lembaga dapat menyesuaikan program pelatihan agar tetap relevan, efektif, dan berkualitas.

Secara regulatif, penerapan sistem penjaminan mutu di Indonesia di dukung oleh kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diperbarui melalui PP Nomor 13 Tahun 2015, mengharuskan setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal dan pelatihan, untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga, tetapi juga bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di tingkat internasional, penerapan standar ISO 21001:2018 tentang Educational Organizations Management System (EOMS) menjadi salah satu rujukan penting dalam pengelolaan mutu organisasi pendidikan. Standar ini dirancang khusus untuk membantu organisasi pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik dan pihak terkait melalui sistem manajemen yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (ISO, 2018). Implementasi ISO 21001:2018 pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta menjamin konsistensi mutu layanan pendidikan.

Dalam praktiknya penerapan sistem penjaminan mutu di lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman sebagian tenaga kerja terhadap pentingnya mutu, keterbatasan sumber

daya, serta belum terbentuknya budaya mutu yang kuat. Hal ini sejalan dengan temuan Susanti dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi serta audit mutu. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, sistem penjaminan mutu cenderung bersifat administratif dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas lembaga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, kebijakan, dan praktik penjaminan mutu yang diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Subjek penelitian meliputi pimpinan lembaga, pengelola mutu, tenaga pendidik, dan staf administrasi yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori manajemen mutu, penjaminan mutu pendidikan, dan standar ISO 21001:2018 guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta rekomendasi pengembangan sistem penjaminan mutu ke depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem penjaminan mutu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan lembaga berfungsi sebagai alat pengendalian kualitas, tetapi juga sebagai sarana peningkatan berkelanjutan terhadap seluruh proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, setiap lembaga pelatihan dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan. Pada tahap perencanaan, lembaga menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pelatihan. Kebijakan mutu tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta, tuntutan dunia kerja, serta standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Sallis (2012) yang menyatakan bahwa penjaminan mutu merupakan proses terencana untuk memastikan bahwa layanan pendidikan berjalan sesuai dengan standar an harapan pengguna jasa pendidikan.

Sistem penjaminan mutu diwujudkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pelatihan. Tenaga pendidik, pengelola, dan staf administrasi memiliki peran masing-masing dalam menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil temuan menunjukkan bahwa keterlibatan seluruh unsur lembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem penjaminan mutu. Kondisi ini sesuai dengan konsep Total Quality Management (TQM) yang dikemukakan oleh Goetsch dan Davis (2014), yang menekankan bahwa peningkatan mutu hanya dapat dicapai apabila seluruh anggota organisasi terlibat secara aktif dan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kualitas.

Pada tahap evaluasi, lembaga pelatihan melaksanakan kegiatan monitoring dan audit mutu secara berkala untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan melaksanakan program. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan umpan balik dari peserta pelatihan, penilaian kinerja tenaga pendidik, serta telaah terhadap dokumen mutu. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat tinjauan manajemen guna menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip continuous improvement yang dikemukakan oleh Deming (1986) melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), di mana mutu harus ditingkatkan secara terus-menerus dan tidak bersifat statis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu berdampak positif terhadap peningkatan profesionalisme kerja di lingkungan lembaga pelatihan. Tenaga pendidik dan staf menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya mutu layanan. Etika profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, terutama dalam proses evaluasi dan audit, agar setiap penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang professional dan berintegritas.

Dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman sebagian pegawai terhadap pentingnya audit mutu serta anggapan bahwa kegiatan penjaminan mutu merupakan beban tambahan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar unit kerja juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan sistem mutu. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan upaya berkelanjutan dalam membangun budaya mutu di lingkungan lembaga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susanti dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, dan komunikasi internal yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu.

Penerapan sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal juga berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan. Kepercayaan tersebut tumbuh

karena lembaga mampu menunjukkan konsistensi dalam menjaga standar mutu, baik dari segi proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, maupun hasil pelatihan yang dihasilkan. Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga dibekali dengan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika kerja yang menjadi bekal penting dalam dunia kerja.

Sistem penjaminan mutu mendorong lembaga untuk melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan. Evaluasi diri menjadi sarana refleksi bagi lembaga dalam menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Melalui mekanisme evaluasi dan audit mutu, lembaga pelatihan dapat mengidentifikasi berbagai potensi masalah sejak dini serta menyusun strategi peningkatan mutu yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai alat pengendali sekaligus pengembangan lembaga dalam jangka panjang.

Dalam konteks pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel dan adaptif, sistem penjaminan mutu juga berperan dalam menjaga relevansi program pelatihan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lembaga pelatihan dituntut untuk mampu menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta sarana pendukung agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, setiap perubahan dan pengembangan program dilakukan secara terencana dan terukur, sehingga mutu pelatihan tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika perubahan lingkungan eksternal.

Penerapan sistem penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan dari peran kepemimpinan dalam organisasi. Pimpinan lembaga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun, komitmen mutu, memberikan teladan, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota organisasi. Kepemimpinan yang berorientasi mutu akan menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka terhadap evaluasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan mutu berpotensi berjalan secara formalitas dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lembaga.

Implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal juga berkaitan erat dengan konsep mutu sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Menurut Sallis (2012), mutu dalam pendidikan bukanlah kondisi yang bersifat statis, melainkan suatu proses yang harus dikembangkan sesuai dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan eksternal. Lembaga pelatihan dituntut untuk melakukan pembaruan secara berkala terhadap kebijakan mutu, kurikulum, serta metode pembelajaran agar tetap relevan dan kompetitif. Temua dilapangan menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan evaluasi rutin dan tindak lanjut perbaikan cenderung lebih mampu menjaga konsistensi mutu dibandingkan lembaga yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrative semata.

Penerapan sistem penjaminan mutu juga memperkuat akuntabilitas lembaga pelatihan terhadap pemangku kepentingan. Menurut Hoy dan Miskel (2013),

akuntabilitas dalam organisasi pendidikan tercermin dari kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerja kepada public secara transparan. Melalui sistem penjaminan mutu, setiap kegiatan pelatihan dapat dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara sistematis, sehingga lembaga memiliki dasar yang kuat dalam menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan sebagai penyedia layanan pendidikan nonformal yang berkualitas.

Dalam perspektif manajemen mutu terpadu, keterlibatan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan sistem penjaminan mutu. Goetsch dan Davis (2014) menegaskan bahwa mutu hanya dapat dicapai apabila seluruh anggota organisasi memiliki komitmen dan kesadaran yang sama terhadap kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kepada pegawainya mampu menumbuhkan budaya mutu yang lebih kuat. Budaya mutu tersebut tercermin dalam sikap disiplin, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kemauan untuk terus memperbaiki kinerja.

Penerapan standar internasional seperti ISO 21001:2018 juga memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan mutu lembaga pendidikan. Menurut International Organization for Standardization (ISO, 2018), ISO 21001 dirancang untuk membantu organisasi pendidikan meningkatkan kepuasan peserta didik melalui sistem manajemen yang efektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Implementasi standar ini di lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal terbukti membantu lembaga dalam menata sistem dokumentasi, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan program pelatihan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu sering menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Susanti dan Rahman (2022) mengemukakan bahwa rendahnya pemahaman pegawai terhadap konsep mutu serta lemahnya komitmen pimpinan dapat menghambat efektivitas sistem penjaminan mutu. Temuan ini juga tercermin dalam hasil penelitian, di mana masih terdapat pegawai yang menganggap kegiatan audit mutu sebagai beban tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlunya strategi penguatan budaya mutu melalui pendekatan persuasif, pelatihan berkelanjutan, serta pemberian penghargaan berbasis kinerja.

Sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lulusan. Menurut UNESCO (2015), pendidikan nonformal yang bermutu memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Lulusan dari lembaga pelatihan yang menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten cenderung memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta sikap profesional yang baik. Sistem penjaminan mutu tidak hanya memberikan manfaat internal bagi lembaga, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan lembaga dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh proses pendidikan, mulai dari pengelolaan kelembagaan, perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh sumber daya manusia, ketersediaan standar operasional yang jelas, serta budaya mutu yang tumbuh secara konsisten di lingkungan lembaga. Penerapan sistem penjaminan mutu yang terstruktur, termasuk mengacu pada prinsip manajemen mutu terpadu dan standar internasional seperti ISO 21001:2018, terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dan belum optimalnya internalisasi budaya mutu, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Implementasi sistem penjaminan mutu tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas internal lembaga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (2018). *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fattah, N. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- ISO. (2018). *ISO 21001:2018 Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations*. Geneva: International Organization for Standardization.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.  
Jakarta